Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1576-1589)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA) TERHADAP SISTEM PPDB DI KABUPATEN KARAWANG ANALISIS IMPLIKASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 BERDASARKAN TEORI EVALUASI KEBIJAKAN WILLIAM N. DUNN

Eva Wahyuni Abdul Rosid[1], Undang Ruslan Wahyudin[2]
Universitas Singaperbangsa , Karawang, Indonesia[1,2]
E-mail: evawahyuniar151102@gmail.com

ABSTRACT

Integration of non-formal religious education rules into the formal education selection system often triggers administrative and legal problems in regions. This study aims to analyze the implications of Karawang Regency Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Compulsory Education for Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) on the mechanism of New Student Admission (PPDB) at the Junior High School (SMP) level. Using a descriptive-qualitative method through policy document analysis, this study adopts William N. Dunn's Public Policy Analysis Theory to dissect the performance of the regulation from the viewpoint of the affirmative group. The research evaluation focuses on the role of the DTA certificate as a final tie-breaker for identical scores. This rule refers to the Karawang Regent's Decree Number 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. The results of the analysis indicate that the implementation of the DTA certificate policy in PPDB has met the aspects of effectiveness, equality of rights, responsiveness, and appropriateness. This policy is proven to be effective as a bureaucratic control tool capable of increasing student participation in religious education. Remarkably, this regulation continues to run without damaging the sense of justice for minority student groups or graduates from formal madrasahs. Through this simplification, the public can see that the policy successfully balances the strengthening of religious values and social justice for all prospective students in the region.

Keywords: *Policy Analysis, Compulsory Diniyah Takmiliyah Awaliyah Education, PPDB, William N Dunn Theory, Karawang*

ABSTRAK

Integrasi aturan pendidikan keagamaan nonformal ke dalam sistem seleksi pendidikan formal sering kali memicu masalah administrasi dan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) terhadap mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui studi dokumen kebijakan (policy document analysis), kajian ini mengadopsi Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn untuk membedah kinerja regulasi tersebut dari sudut pandang kelompok afirmatif.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1576-1589)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Evaluasi penelitian difokuskan pada peran sertifikat DTA sebagai penentu akhir atau pemecah nilai yang sama. Aturan ini mengacu pada Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sertifikat DTA dalam PPDB sudah memenuhi aspek efektivitas, kesamaan hak, daya tanggap, dan ketepatan. Kebijakan ini terbukti efektif sebagai alat kendali birokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan agama. Hebatnya, aturan ini tetap berjalan tanpa merusak rasa keadilan bagi kelompok siswa minoritas maupun lulusan dari madrasah formal. Melalui penyederhanaan ini, masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan tersebut berhasil menyeimbangkan antara penguatan nilai agama dan keadilan sosial bagi seluruh calon peserta didik di daerah.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, Wajib Belajar Diniah Takmiliah Awaliah, PPDB, Teori William N Dunn, Karawang*

PENDAHULUAN

Pendidikan keagamaan nonformal memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa yang religius dan berakhlak mulia. Di Kabupaten Karawang, kesadaran akan pentingnya basis moral ini melahirkan terobosan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). Regulasi ini mewajibkan anak usia sekolah dasar untuk menempuh pendidikan keagamaan nonformal di samping pendidikan umum formal mereka. Namun, dinamika muncul ketika kebijakan daerah ini diintegrasikan ke dalam domain seleksi pendidikan formal, khususnya pada mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. Integrasi ini secara administratif mewajibkan kepemilikan atau penggunaan sertifikat kelulusan DTA sebagai instrumen pemutus atau pemecah nilai yang sama (tie-breaker) pada seleksi jalur zonasi atau jalur afirmasi.

Tinjauan literatur atau state of the art overview dari sepuluh studi terdahulu menunjukkan pola hubungan yang variatif antara regulasi lokal keagamaan dan sistem birokrasi sekolah. Studi oleh Hidayat (2016) dan Ahmad (2017) menemukan bahwa perda wajib belajar DTA sering mengalami hambatan implementasi akibat lemahnya sanksi administratif bagi pelanggar. Sebaliknya, Rahman (2018) serta Saputra (2019) menyoroti ketegangan hukum yang muncul ketika sertifikat nonformal dipaksakan menjadi syarat mutlak kelulusan atau pendaftaran sekolah negeri, yang dinilai berisiko diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya, penelitian Wardani (2020), Fauzi (2021), dan Lestari (2022) mengkaji efektivitas insentif bagi guru mengaji namun mengabaikan implikasi sistemik birokrasi PPDB. Adapun studi komparatif oleh Pratama (2023),

Siregar (2024), dan Utami (2024) menguraikan pola integrasi di wilayah lain yang cenderung memicu maladministrasi.

Keunikan dan keistimewaan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisisnya yang spesifik membedah sertifikat DTA bukan sebagai syarat administratif absolut pendaftaran, melainkan sebagai penentu akhir atau pemecah nilai yang sama (tie-breaker parameter) mengacu pada Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. Melalui sudut pandang kelompok afirmatif, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan asas keadilan sosial dengan penguatan nilai-nilai keagamaan lokal. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implikasi kebijakan tersebut serta menguji kinerjanya menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, guna memastikan integritas sistem PPDB bebas konflik administrasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini mendasarkan diri pada Teori Analisis Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan merupakan salah satu fungsi analisis yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja dan konsekuensi dari suatu kebijakan yang telah diterapkan. Kinerja kebijakan diukur melalui beberapa kriteria utama, di antaranya adalah efektivitas (apakah hasil yang diinginkan tercapai), kesamaan hak atau ekuitas (apakah manfaat dan beban didistribusikan secara adil), daya tanggap (apakah kebijakan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran), dan ketepatan (apakah tujuan kebijakan benar-benar berguna bagi masyarakat).

Selain teori evaluasi Dunn, kajian ini didukung oleh konsepsi integrasi sistem pendidikan keagamaan nonformal ke dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) diposisikan sebagai subsistem pemenuhan kompetensi keagamaan dasar bagi peserta didik muslim. Secara konseptual, penempatan sertifikat keagamaan sebagai kriteria pemecah nilai yang sama dalam PPDB merupakan bentuk insentif birokrasi (bureaucratic incentive) yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa melanggar batasan hak konstitusional warga negara atas pendidikan umum formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi dokumen kebijakan (policy document analysis). Fokus kajian difokuskan pada penelaahan teks yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui

dokumentasi arsip resmi dinas pendidikan dan kementerian agama setempat, disusul dengan wawancara mendalam dengan pelaksana teknis PPDB serta perwakilan kelompok afirmatif masyarakat. Teknik analisis data mengadopsi model analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif-naratif, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi difokuskan pada pembantahan atau pembuktian hipotesis efektivitas regulasi menggunakan empat indikator Teori William N. Dunn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025, penelitian ini mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan keagamaan daerah dan mekanisme penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fokus analisis diarahkan pada kedudukan sertifikat kelulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), terutama dalam kaitannya dengan penentuan prioritas seleksi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan formal serta nonformal.

Berdasarkan temuan awal yang telah diuraikan, sertifikat DTA diposisikan sebagai instrumen administratif yang berpotensi menjadi pembeda ketika calon peserta didik mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan kriteria seleksi utama. Kedudukan ini menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan nonformal memperoleh pengakuan tambahan melalui mekanisme kebijakan penerimaan peserta didik. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai bukti penyelesaian pembelajaran, tetapi juga mempunyai relevansi administratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.

Secara analitis, temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara regulasi pendidikan daerah dan pengelolaan akses terhadap pendidikan formal. Pemerintah daerah tidak hanya mengatur prosedur penerimaan peserta didik, tetapi melalui desain kriteria seleksi juga dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman pendidikan yang diperoleh di luar sekolah formal. Dalam konteks ini, sertifikat DTA dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan administratif terhadap partisipasi dalam pendidikan keagamaan nonformal.

Meskipun demikian, pengakuan administratif tersebut perlu dibedakan dari penilaian terhadap kualitas karakter peserta didik. Sertifikat kelulusan menunjukkan pemenuhan ketentuan pembelajaran yang ditetapkan lembaga penerbit, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa pemegangnya mempunyai tingkat moralitas yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik lain. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu memisahkan fungsi dokumen dalam mekanisme seleksi dari dampak

pendidikan yang mungkin dihasilkan melalui proses pembelajaran DTA.

Penggunaan analisis dokumen kebijakan memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana tujuan, persyaratan, dan mekanisme administrasi dirumuskan dalam peraturan. Sementara itu, wawancara mendalam dengan pelaksana teknis PPDB dapat digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik. Keterangan dari perwakilan kelompok afirmatif masyarakat selanjutnya dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dipahami oleh kelompok yang terdampak, termasuk mengenai akses, keadilan, dan kendala administratif.

Penggabungan ketiga sumber tersebut penting karena suatu kebijakan dapat mempunyai rumusan normatif yang jelas, tetapi pelaksanaannya menghadapi persoalan teknis atau menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat. Dengan membandingkan isi dokumen, keterangan pelaksana, dan pandangan kelompok terdampak, penelitian dapat menilai kesesuaian antara desain kebijakan dan implementasinya secara lebih komprehensif.

Kebijakan penggunaan sertifikat DTA dalam PPDB dapat dianalisis melalui konsep *regulatory pressure*, yaitu daya dorong regulasi yang memengaruhi keputusan masyarakat melalui konsekuensi administratif suatu aturan. Ketika sertifikat pendidikan diniyah mempunyai kedudukan dalam mekanisme penentuan prioritas, keluarga berpotensi mempertimbangkan keikutsertaan anak dalam pendidikan DTA sebagai bagian dari persiapan memasuki jenjang SMP.

Dari perspektif implementasi kebijakan, hubungan tersebut memperlihatkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur, tetapi juga dapat membentuk insentif bagi kelompok sasaran. Kebijakan yang menghubungkan aktivitas tertentu dengan konsekuensi administratif dapat memengaruhi cara masyarakat menentukan pilihan. Dalam konteks penelitian ini, sertifikat DTA berpotensi meningkatkan perhatian orang tua terhadap pendidikan diniyah karena mempunyai relevansi dengan proses penerimaan peserta didik.

Namun, keberadaan insentif administratif tidak serta-merta membuktikan bahwa partisipasi masyarakat meningkat atau bahwa motivasi keluarga berubah secara menyeluruh. Kesimpulan tersebut perlu didasarkan pada hasil wawancara, data partisipasi, atau bukti lain yang diperoleh selama penelitian. Apabila informan menyatakan bahwa kebijakan menjadi pertimbangan orang tua dalam mendaftarkan anak ke DTA, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti mengenai persepsi dan motivasi kelompok sasaran. Akan tetapi, klaim mengenai perubahan perilaku masyarakat secara luas memerlukan dukungan yang memadai dari berbagai sumber.

Dalam analisis ini, penting pula untuk membedakan kepatuhan instrumental dan kepatuhan substantif. Kepatuhan instrumental terjadi ketika masyarakat mengikuti suatu ketentuan karena mempertimbangkan keuntungan administratif yang mungkin diperoleh. Sebaliknya, kepatuhan substantif berkaitan dengan penerimaan terhadap tujuan dan nilai yang mendasari kebijakan. Dalam pelaksanaan pendidikan diniyah, kedua bentuk kepatuhan tersebut dapat saling berkaitan, tetapi tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama.

Apabila orang tua mendaftarkan anak ke DTA terutama untuk memenuhi persyaratan administratif, partisipasi yang terjadi belum tentu mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan keagamaan. Sebaliknya, apabila keterlibatan tersebut diikuti dengan dukungan keluarga terhadap proses pembelajaran, kebijakan berpotensi memberikan manfaat pendidikan yang lebih luas. Perbedaan ini penting untuk menghindari kesimpulan bahwa peningkatan partisipasi administratif secara otomatis menghasilkan peningkatan karakter peserta didik.

Oleh karena itu, keterangan pelaksana teknis PPDB dan kelompok afirmatif masyarakat perlu dianalisis berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti pemahaman terhadap aturan, motivasi mengikuti pendidikan diniyah, kendala pemenuhan dokumen, dan persepsi mengenai keadilan seleksi. Hasil analisis tersebut dapat memperlihatkan apakah kebijakan dipahami secara konsisten oleh pelaksana dan masyarakat serta apakah terdapat kesenjangan antara tujuan regulasi dan pengalaman kelompok yang terdampak.

Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan William N. Dunn untuk menilai efektivitas regulasi berdasarkan empat indikator yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Penggunaan kerangka evaluasi tersebut bertujuan menghubungkan temuan empiris dengan konsep teoretis sehingga pembahasan tidak berhenti pada deskripsi isi peraturan, tetapi juga menjelaskan makna, implikasi, dan keterbatasan pelaksanaan kebijakan.

Empat indikator yang digunakan harus dijelaskan sesuai dengan operasionalisasi dalam bagian metode penelitian. Setiap indikator perlu mempunyai hubungan yang jelas dengan fokus pertanyaan penelitian, kategori data yang dianalisis, serta bukti yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai alat analisis untuk menginterpretasikan data, bukan sekadar sebagai kerangka konseptual yang dicantumkan setelah deskripsi temuan.

Dalam penerapannya, analisis dapat dimulai dengan mengidentifikasi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025 yang relevan dengan setiap indikator. Selanjutnya, ketentuan tersebut

dibandingkan dengan keterangan pelaksana teknis dan perwakilan kelompok afirmatif masyarakat. Apabila terdapat kesesuaian antara regulasi dan keterangan informan, kesesuaian tersebut dapat memperkuat interpretasi mengenai pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan, peneliti perlu menjelaskan kemungkinan sumber perbedaan tersebut berdasarkan data yang tersedia.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti membedakan antara efektivitas desain kebijakan dan efektivitas implementasi. Desain kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan, kriteria, dan prosedur yang dirumuskan dalam dokumen resmi. Sementara itu, efektivitas implementasi berkaitan dengan bagaimana aturan dilaksanakan oleh pelaksana serta bagaimana kelompok sasaran mengalami konsekuensi kebijakan. Kedua aspek tersebut saling berhubungan, tetapi tidak dapat disamakan.

Jika dokumen menunjukkan bahwa sertifikat DTA mempunyai kedudukan yang jelas dalam mekanisme seleksi, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai konsistensi desain kebijakan. Namun, untuk menyimpulkan bahwa mekanisme itu berjalan efektif di lapangan, diperlukan keterangan pelaksana atau bukti pelaksanaan yang menunjukkan bahwa ketentuan benar-benar diterapkan sesuai dengan rumusan resmi.

Dengan demikian, penerapan teori William N. Dunn dalam penelitian ini perlu diarahkan pada penjelasan mengenai apa yang ditemukan, mengapa temuan tersebut muncul berdasarkan konteks regulasi dan implementasinya, serta apa kontribusinya terhadap pemahaman mengenai kebijakan pendidikan daerah.

Keadilan merupakan salah satu persoalan penting dalam evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik karena mekanisme seleksi berkaitan dengan distribusi kesempatan memperoleh layanan pendidikan. Penggunaan sertifikat DTA sebagai instrumen pembeda perlu dianalisis dengan memperhatikan perbedaan kondisi sosial ekonomi, ketersediaan lembaga pendidikan diniyah, lokasi tempat tinggal, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan administratif.

Secara normatif, suatu kriteria dapat dirumuskan secara seragam, tetapi dampaknya belum tentu sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Keluarga yang mempunyai akses mudah terhadap lembaga DTA dapat menghadapi proses pemenuhan persyaratan yang berbeda dibandingkan keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan atau mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerataan kesempatan perlu diperiksa berdasarkan kondisi yang benar-benar ditemukan dalam penelitian, bukan diasumsikan hanya dari rumusan regulasi.

Wawancara dengan perwakilan kelompok afirmatif masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelompok

yang berpotensi menghadapi hambatan akses. Keterangan informan dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap persyaratan, biaya dan waktu pemenuhan dokumen, serta persepsi terhadap mekanisme seleksi. Apabila informan menyampaikan adanya hambatan tertentu, peneliti perlu membandingkan keterangan tersebut dengan isi peraturan dan keterangan pelaksana teknis untuk mengetahui apakah persoalan berasal dari desain regulasi, pelaksanaan administratif, atau kondisi sosial yang lebih luas.

Demikian pula, apabila petunjuk teknis menetapkan dokumen alternatif atau pengecualian bagi peserta didik dari jalur pendidikan tertentu, keberadaan ketentuan tersebut perlu dianalisis berdasarkan rumusan resminya dan pelaksanaannya. Keberadaan pengecualian dalam dokumen dapat menunjukkan adanya upaya mengakomodasi keragaman jalur pendidikan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh kelompok telah memperoleh perlakuan yang adil. Penilaian tersebut memerlukan bukti mengenai konsistensi penerapan dan pengalaman kelompok terdampak.

Dari sudut pandang responsivitas, kebijakan dapat dinilai berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat serta menyediakan mekanisme yang jelas ketika muncul persoalan administratif. Sosialisasi yang mudah dipahami, prosedur verifikasi yang konsisten, dan saluran pengaduan yang dapat diakses merupakan aspek yang dapat mendukung penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

Dengan demikian, analisis keadilan dan responsivitas tidak hanya berfokus pada apakah aturan memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga pada bagaimana aturan diterapkan dan apakah kelompok yang terdampak dapat memahami serta memenuhi ketentuan tersebut. Pendekatan ini membuat evaluasi kebijakan lebih sensitif terhadap perbedaan pengalaman masyarakat.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu diperlukan untuk menjelaskan posisi penelitian ini dalam kajian kebijakan pendidikan. Berdasarkan referensi yang telah digunakan dalam naskah, penelitian Suharto (2021:52) membahas peran pendidikan diniyah dalam internalisasi nilai akhlak dan pembentukan perilaku remaja. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian ini karena sama-sama menempatkan pendidikan diniyah sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Perbedaannya terletak pada fokus analisis: penelitian ini menelaah kedudukan sertifikat DTA dalam mekanisme administratif PPDB.

Perbedaan tersebut dapat memberikan kontribusi berupa perluasan perspektif dari dimensi pedagogis menuju dimensi tata kelola kebijakan. Pendidikan diniyah tidak hanya dikaji sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai institusi yang dokumen kelulusannya dapat

memperoleh kedudukan tertentu dalam kebijakan penerimaan peserta didik. Namun, kontribusi tersebut harus dirumuskan sebagai perbedaan fokus atau perluasan analisis, bukan sebagai bukti bahwa kebijakan administratif telah meningkatkan efektivitas pendidikan karakter.

Sementara itu, Rahman (2022:85), sebagaimana dijelaskan dalam naskah, mengemukakan kekhawatiran mengenai potensi persoalan administratif dan ketidaksetaraan ketika persyaratan keagamaan dimasukkan ke dalam mekanisme PPDB. Pandangan tersebut relevan untuk mengevaluasi kejelasan dasar hukum, kedudukan sertifikat DTA, dan konsistensi penerapannya. Apabila hasil analisis dokumen dan wawancara menunjukkan adanya pembedaan yang jelas antara kriteria utama dan instrumen pembeda, temuan tersebut dapat memperkaya pembahasan mengenai bagaimana desain kebijakan memengaruhi bentuk dan tingkat risiko administratif.

Akan tetapi, penelitian tidak dapat menyimpulkan bahwa risiko diskriminasi telah sepenuhnya terbantahkan hanya karena sertifikat ditempatkan sebagai instrumen pembeda. Kesimpulan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengalaman kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu, kontribusi penelitian lebih tepat diarahkan pada penjelasan mengenai hubungan antara desain kriteria seleksi, penerapan administratif, dan persepsi kelompok sasaran.

Adapun penelitian Purnamasari dkk. (2024:122), sebagaimana dirujuk dalam naskah, menyoroti keterbatasan daya dorong regulasi lokal dalam meningkatkan partisipasi pendidikan diniyah. Penelitian ini dapat dibandingkan dari sisi instrumen implementasi, khususnya hubungan antara pengaturan administratif dan keputusan masyarakat. Penggunaan sertifikat DTA dalam mekanisme PPDB berpotensi menciptakan insentif yang berbeda dibandingkan kebijakan yang hanya menggunakan imbauan. Namun, perbedaan instrumen tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa hasil kebijakan di Karawang lebih baik tanpa indikator dan data pembanding yang sepadan.

Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara regulasi pendidikan daerah, pengakuan administratif terhadap pendidikan diniyah, dan pengalaman pelaksana serta kelompok masyarakat yang terdampak. Penggunaan dokumen dan wawancara memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan ketentuan formal, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan. Kekuatan kontribusi ini bergantung pada ketepatan interpretasi data, konsistensi penggunaan teori, dan keterverifikasian penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding.

Berdasarkan kerangka penelitian deskriptif-kualitatif, analisis kebijakan

sertifikat DTA dalam PPDB SMP Kabupaten Karawang perlu memadukan temuan dokumen dengan keterangan informan. Dokumen resmi memberikan dasar untuk mengidentifikasi tujuan, persyaratan, dan mekanisme yang dirumuskan pemerintah. Wawancara dengan pelaksana teknis membantu menjelaskan implementasi ketentuan, sedangkan keterangan perwakilan kelompok afirmatif memberikan perspektif mengenai akses dan pengalaman kelompok terdampak.

Penggabungan sumber data tersebut memungkinkan peneliti menilai apakah terdapat kesesuaian antara desain dan pelaksanaan kebijakan. Jika ketentuan tertulis diterapkan secara konsisten, hal itu dapat menjadi temuan mengenai kesesuaian implementasi. Jika terdapat perbedaan antara ketentuan dan pengalaman informan, perbedaan tersebut perlu dianalisis sebagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum, pemerataan, atau efektivitas administrasi.

Dari sisi kebijakan, hasil analisis dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan kejelasan rumusan petunjuk teknis, standardisasi verifikasi dokumen, peningkatan sosialisasi, dan penyediaan mekanisme pengaduan. Rekomendasi tersebut perlu disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar ditemukan dalam dokumen maupun wawancara, sehingga tidak menjadi daftar saran yang terlepas dari hasil penelitian.

Dari sisi pendidikan, pengakuan terhadap sertifikat DTA perlu disertai perhatian terhadap kualitas proses pembelajaran. Kebijakan administratif dapat mendorong masyarakat memperhatikan pendidikan diniyah, tetapi keberhasilan pendidikan karakter tetap bergantung pada kualitas pengajaran, keteladanan, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan harus membedakan manfaat administratif yang dapat ditunjukkan oleh dokumen dan implementasi dari manfaat pendidikan yang membutuhkan bukti tambahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana regulasi daerah menghubungkan pendidikan diniyah dengan mekanisme penerimaan peserta didik formal, bagaimana hubungan tersebut diterapkan oleh pelaksana, dan bagaimana kebijakan dipahami oleh kelompok yang terdampak. Dengan menggunakan teori William N. Dunn sebagai kerangka evaluasi, penelitian dapat memberikan argumentasi mengenai efektivitas regulasi berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam metode. Kontribusi akhirnya bukan semata-mata menyatakan bahwa kebijakan berhasil atau tidak berhasil, melainkan menjelaskan kondisi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, kendala yang ditemukan, serta implikasinya bagi pengelolaan

pendidikan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) ke dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan pendidikan keagamaan nonformal. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara regulasi pendidikan keagamaan daerah dan pengelolaan akses terhadap pendidikan formal melalui penetapan kriteria administratif dalam proses seleksi peserta didik.

Dalam mekanisme tersebut, sertifikat atau ijazah DTA memiliki relevansi administratif sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis PPDB yang berlaku. Apabila dokumen tersebut digunakan sebagai instrumen pembeda ketika calon peserta didik memiliki kedudukan yang sama berdasarkan kriteria seleksi utama, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai tie-breaker mechanism. Penggunaan instrumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman pendidikan nonformal melalui desain kebijakan penerimaan peserta didik. Meskipun demikian, kedudukan sertifikat DTA harus dipahami berdasarkan rumusan resmi regulasi dan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti bahwa pemegangnya mempunyai karakter atau moralitas yang lebih baik dibandingkan peserta didik lainnya.

Ditinjau melalui teori analisis kebijakan William N. Dunn, evaluasi kebijakan ini perlu memperhatikan lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian. Dari aspek efektivitas, penggunaan sertifikat DTA berpotensi menjadi instrumen administratif yang mendorong perhatian masyarakat terhadap pendidikan diniyah. Kebijakan ini juga dapat menciptakan regulatory pressure, yaitu daya dorong regulasi yang memengaruhi keputusan masyarakat karena adanya konsekuensi administratif dalam proses PPDB. Namun, peningkatan partisipasi pendidikan diniyah dan perubahan motivasi orang tua perlu dibuktikan melalui hasil wawancara, data partisipasi, atau sumber empiris lainnya sebelum dinyatakan sebagai dampak kebijakan yang telah terbukti.

Dari aspek kecukupan, kebijakan ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pendidikan keagamaan di luar pembelajaran agama yang diselenggarakan melalui pendidikan formal. Pendidikan DTA berpotensi melengkapi pengalaman belajar

keagamaan peserta didik, khususnya dalam pembelajaran yang berlangsung di lingkungan pendidikan nonformal. Akan tetapi, kebijakan administratif tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keterbatasan pembelajaran agama dalam kurikulum nasional telah teratasi. Penilaian terhadap kecukupan kebijakan tetap perlu mempertimbangkan kualitas pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan, dan dukungan lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selanjutnya, dari aspek pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, penerapan sertifikat DTA perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya memperhatikan keragaman kondisi sosial masyarakat Kabupaten Karawang. Ketersediaan lembaga DTA, lokasi tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta kemampuan memenuhi persyaratan administratif dapat memengaruhi pengalaman calon peserta didik dalam mengikuti seleksi. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keberadaan suatu ketentuan yang berlaku secara seragam belum cukup untuk membuktikan tercapainya keadilan substantif apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan akses.

Analisis pasca implementasi kebijakan melalui dokumen regulasi dan wawancara dengan pelaksana teknis PPDB serta perwakilan kelompok afirmatif masyarakat menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Dokumen resmi memberikan dasar untuk memahami tujuan, persyaratan, dan mekanisme kebijakan, sedangkan wawancara dapat menjelaskan interpretasi pelaksana, pengalaman kelompok terdampak, serta kemungkinan kendala dalam penerapan aturan. Penggabungan sumber tersebut memungkinkan peneliti menilai efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan keagamaan daerah, pengakuan administratif terhadap pendidikan DTA, dan mekanisme penerimaan peserta didik pada pendidikan formal. Kebijakan tersebut memiliki potensi untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan formal dan nonformal, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi atau penggunaan sertifikat sebagai kriteria seleksi. Keberhasilan kebijakan juga perlu dilihat dari konsistensi implementasi, pemerataan kesempatan, penerimaan masyarakat, dan ketercapaian tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kejelasan dasar hukum dan rumusan petunjuk teknis, standardisasi verifikasi dokumen, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Selain

itu, pengakuan administratif terhadap pendidikan DTA perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas proses pembelajaran agar tujuan pendidikan keagamaan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan PPDB. Secara keseluruhan, kebijakan ini perlu dinilai secara proporsional berdasarkan bukti empiris dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, transparansi, keadilan akses, dan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Monograf:

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.

Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika dan Analisis. Elex Media Komputindo.

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.

Artikel Jurnal Ilmiah (Nasional Terakreditasi):

Purnamasari, D., Rahayu, S., & Utama, B. (2024). Efektivitas Kebijakan Berbasis Perspektif William N. Dunn di Kawasan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik (JKP), 12(2), 115–128.

Rahman, A. (2022). Otonomi Pendidikan dan Intervensi Kebijakan Lokal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan, 16(1), 78–92.

Suharto, A. (2021). Internalisasi Nilai Akhlakul Karimah Melalui Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Teoretis dan Praktis, 9(1), 45–58.

Dokumen Hukum / Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2013). Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2025). Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.156-Huk/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124.